

PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PEMERINTAHAN NAGARI DALAM MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI SUMATERA BARAT

Oleh:

M. Fachri Adnan, Al Rafni, Zikri Alhadi, Suryanef,
Universitas Negeri Padang

Abstrak

Kegiatan Iptek bagi Desa Mita (IbDM) dilaksanakan karena adanya permasalahan yang dihadapi pemerintahan Nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilia dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan yang ingin dicapai agar Pemerintah Nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilia mampu menyusun panduan tata kelola pemerintahan nagari yang baik (*good governance*), mampu melaksanakan perinsip-perinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan panduan tersebut, serta mampu melaksanakan monev secara mandiri sesuai dengan panduan tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah “metode partisipatif” yang lebih menekankan peran serta seluruh peserta pelatihan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode ini dilaksanakan dalam beberapa proses kegiatan belajar yaitu; pencairan suasana (*ice breaking*), ceramah, diskusi, curah pendapat, studi kasus, praktek dan peragaan. Tahap pelatihan dimulai dengan penetapan tujuan pelatihan kemudian diikuti dengan pemberian materi pelatihan dan pendampingan setelah pelaksanaan pelatihan. Kontribusi program IbDM kepada khalayak sasaran adalah pemerintah dan masyarakat Kamang Mudiak dan Kamang Hilia adalah pemerintah nagari makin maningkat pengetahuan dan kemampuannya dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, masyarakat sebagai salah salah pilar pendukung tata kelola pemerintahan juga dapat diberdayakan sehingga meningkat pula peranan dan partisipasinya dalam mewujudkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien di lokasi nagari binaan.

Keyword: *Nagari, Pemerintahan, Masyarakat, Tata Kelola*

PENDAHULUAN

Kegiatan Iptek bagi nagari binaan ini (IBNB) berdasarkan hasil penelitian M. Fachri Adnan dan Al Rafni tahun 2014 dan 2015 tentang Tata Kelola Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan aparatur pemerintah

nagari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat masih rendah, sehingga pelaksanaan tata kelola pemerintahan nagari belum berjalan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hasil penelitian Karjuni Dt. Maani (2010) juga menyimpulkan kurangnya

kemampuan pemerintah nagari mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disebabkan oleh rendahnya kemampuan substansial dan prosedural aparatur pemerintah nagari dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan penguatan kelembagaan. Selanjutnya penelitian Syaiful, dkk (2007) menyimpulkan beberapa masalah yang dihadapi pemerintahan nagari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat diantaranya; a. rendahnya kualitas SDM hampir pada semua kelembagaan yang ada, b. sistem dan prosedur kerja yang belum tertata dengan baik; c. kordinasi dalam pelaksanaan masih lemah; dan d. rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan nagari pada berbagai nagari di Sumatera Barat juga ditemukan di nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilia. Penelitian Adnan dan Al Rafni (2014 dan 2015) menunjukkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kamang Mudiak dan Kamang Hilia belum berjalan sesuai yang diharapkan.

sebagai wilayah penelitian Hasil studi pendahuluan di kedua nagari mitra yaitu nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilia menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan nagari dalam melaksanakan tata kelola

pemerintahan nagari yang baik, efektif, dan efisien masih rendah. Hal itu disebabkan karena pada umumnya tingkat pendidikan aparat pemerintah nagari rata-rata tamatan SLTA. Disamping itu aparat pemerintah nagari di kedua nagari mitra jarang sekali mendapatkan penyuluhan dan pelatihan tentang tata kelola pemerintahan nagari.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya serta analisis terhadap profile dan Studi pendahuluan di nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek dapat dikemukakan bahwa kedua nagari mitra masih menghadapi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah nagari tentang perinsip-perinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Kurangnya ketrampilan aparatur pemerintah nagari dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan Nagari.
3. Kurangnya kompetensi aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
4. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan aparat pemerntahan nagari dalam menyusun rencana anggaran dan mengelola keuangan nagari.

Permasalahan-permasalahan perlu dicarikan solusi yang tepat agar pemerintah nagari dapat berjalan secara efektif dan efisien disertai dengan partisipasi serta dukungan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan nagari di nagari mitra Kamang Mudiak dan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam maka perlu dilakukan “Pemberdayaan Aparat Pemerintah dalam melaksanakan Tata Tata Kelola Pemerintahan di Nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

Target yang ingin dicapai dengan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini ialah: terdapat peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah nagari tentang perinsip-perinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada kedua nagari mitra Kamang Mudiak dan Kamang Hilia .

1. Keterampilan aparatur pemerintah nagari dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan pada kedua nagari mitra makin meningkat.
2. Kompetensi aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada kedua nagari mitra dapat ditingkatkan.
3. Pengetahuan dan ketrampilan aparat pemerntahan nagari dalam menyusun rencana

anggaran dan mengelola keuangan nagari pada kedua nagari mitra dapat ditingkatkan.

METODE PELAKSANAAN

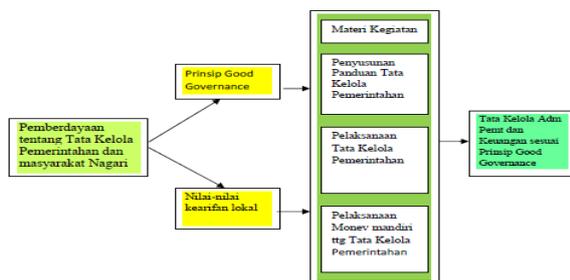
Metode yang digunakan untuk mendukung realisasi program “Pemberdayaan aparat Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan Tata Tata Kelola Pemerintahan di Nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dengan “metode pelatihan partisipatif” yang menekankan peran serta seluruh peserta pelatihan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelatihan ini dimulai dengan penetapan pendidikan dan latihan kemudian diikuti dengan bimbingan teknis dan pendampingan tentang pelaksanaan tata kelola pemerintahan nagari. Secara rinci beberapa metoda yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

- a. *Ceramah.* Dilakukan agar peserta memahami tujuan, sasaran dan output kegiatan pelatihan yang mencakup tiga aspek tata kelola pemerintahan yang baik yaitu perencanaan pembangunan, pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan.
- b. *Diskusi.* Merupakan proses yang dilakukan untuk membahas masalah yang terkait dengan perencanaan pembangunan, administrasi

pemerintahan, dan pengelolaan keuangan.

- c. *Workshop*, Dilakukan untuk melatih ketrampilan peserta dalam penyusunan beberapa jenis buku administrasi pemerintahan nagari, penyusunan perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan nagari sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun kerangka konseptual dalam pelaksanaan pemberdayaan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan masyarakat nagari adalah sebagai berikut:



Gambar: Kerangka Konseptual Program Nagari Binaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil yang dicapai

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di nagari mitra Kamang Mudiak dan Kamang Hilia terdiri dua bagian kegiatan yaitu; pendidikan dan latihan, dan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis yang

disertai dengan praktek atau aplikasi.

1) Workshop

Workshop dalam rangka Pendidikan dan latihan pada kegiatan kepada masyarakat di nagari binaan Kamang Mudiak dan Kamang Hilia dilaksanakan pada tanggal 29-31 Oktober sampai dengan 1 September 2018. Kegiatan dan pendidikan dan latihan ini diikuti oleh 31 peserta di Nagari Kamang Mudiak dan 28 orang peserta di nagari Kamang Hilia. Peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini terdiri berbagai unsur yaitu dari wali nagari, sekretaris nagari, perangkat nagari, wali jorong, pengurus dan anggota Badan Musyawarah Nagari (Bamus) di Kamang Mudiak dan Kamang Hilia.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapat dukungan dan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Agam dalam penyediaan tenaga tenaga ahli dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan. Adapun tenaga ahli Dr. Fahmi Rizal M.Pd, MT dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, Widyastuti S.E, Kepala Bidang Keuangan dan Kekayaan nagari Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Agam. Nara sumber lain dan sekaligus pembimbing dan pendamping Workshop yaitu

Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D, Dra. Al Rafni, M.Si, Zikri Alhadi, S.AP, MA, Drs. Suryanef, M.Si. Nara sumber dan materi

yang diberikan dalam pendidikan dan pelatihan ini adalah seperti tercantum pada

2) Bimbingan Teknis/Pendampingan

Bimbingan teknis atau pendampingan dilaksanakan untuk memberikan petunjuk teknis bagaimana mempraktekkan materi workshop sebelumnya. Dengan bimbingan teknis ini diharapkan perangkat pemerintahan nagari makin mahir administrasi pemerintahan nagri, mengelola administrai keuangan, serta menyusun perencanaan pembangunan nagari. .

Materi Dalam pelaksanaan bimbingan teknis atau pendampingan dapat dipraktikan beberapa jenis administrasi pemerintahan nagari diantaranya:

Tabel Materi Kegiatan pada Bimbingan Teknis/Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Nagari

No	Materi
1	Administrasi Pemerintahan Nagari
	a. Pembuatan Notulensi Rapat
	b. Pembuatan Buku Peraturan Nagari
	c. Pembuatan Buku Inventariasi dan Kekayaan Nagari
	d. Penyusunan Buku Mutasi Penduduk
2	Penyusunan Rencana Pembangunan Sarana

	Prealisasasarana Fisik
	a. Rencana Pembangunan di Tingkat Jorong
	b. Rencana Pembangunan Tingkat Nagari
3	Pengelolaan Administrasi Keuangan
	a. Buku Kas Pembantu Pajak
	b. Buku Kas Umum
	c. Registrasi Permintaan Pembayaran
	d. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari/Desa

a. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di nagari binaan Kamang Mudiak dan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dapat mencapai yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun target yang telah dalam kegiatan pengabdian ini antara lain:

- 1) Pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintahan nagari, tokoh-tokoh masyarakat baik dari unsur Badan Musyawarah Nagari, Kerapatan Adat Nagari, ketua-ketua lembaga masyarakat nagari tentang tata kelola pemerintahan nagari dapat ditingkatkan. Hal itu terindikasi dari jawaban peserta terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan pada waktu evaluasi kegiatan. Evaluasi ini berlanjut dengan peningkatan kapasitas kemampuan

perangkat nagari dalam mengelola administrasi pemerintahan nagari.

- 2) Ketrampilan aparat pemerintahan nagari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dioptimalkan. Hal itu terlihat dari kemampuan mereka dalam pelaksanaan bimbingan teknis atau pendampingan tentang pembuatan beberapa jenis tata administrasi pemerintahan, penyusunan RPJM, penyusunan RAB, perencanaan pembangunan, dan sebagainya.
- 3) Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi unsur-unsur dalam nagari untuk kelola pemerintahan nagari yang lebih baik dan transparan
- 4) Kegiatan pengabdian ini juga dapat menghasilkan draf Buku Panduan Tata Kelola Pemerintahan Nagari dengan Perspektif *Good Governance* untuk meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan nagari.

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan serta mendapat masukan dari pemerintah nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilia tentang manfaat program pengabdian di nagari binaan Kamang Mudiak dan Kamang Hilia Kec. Kamang Magek. Evaluasi dilaksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada wali nagari dan perangkat nagari serta tokoh-tokoh masyarakat yang ikut kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam

evaluasi kegiatan yaitu;

**Tabel Daftar Pertanyaan
Evaluasi Kegiatan**

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibuk/sdr tentang manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat di nagari Kamang Mudiak /Kamang Hilia ini?
2.	Apakah materi yang diberikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kamang Mudiak dan Kamang Hilia ini sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan nagari?
3.	Apakah metoda yang digunakan para nara sumber dapat memudahkan bapak/ibuk/sdr dalam memahami isi materi yang disajikan?
4.	Materi apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemajuan tata kelola pemerintahan di Kamang Mudiak dan Kamang Hilia ini?
5.	Bagaimana pendapat bapak/ibuk/sdr apakah program pengabdian masyarakat perlu dilanjutkan untuk tahun yang akan datang?

Berdasarkan jawaban peserta pelatihan dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di nagari binaan Kamang Hilia dan Kamang Mudiak dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

Tabel Daftar Poin Hasil Evaluasi

No	Daftar Poin
1.	Pemerintah nagari Kamang Hilia dan Kamang Mudiak dan para peserta pelatihan berpendapat bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat di nagari binaan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari.
2.	Materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di nagari binaan ini sangat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan nagari karena nara sumber yang memberikan sangat menguasai materi dan kompeten.
3.	Metoda yang digunakan nara sumber dalam kegiatan pengabdian ini sangat sesuai dengan materi yang disampaikan, sehingga materi pelatihan dapat dipahami dengan mudah.
4.	Para peserta mengarpakan agar pelatihan dan pendampingan tentang penyusunan RAB, pengelolaan keuangan,

pengelolaan dan pelaloran kegiatan, penyusunan RAB pembangunan, dan penyusunan RKP dapat di tingkatkan.

PEMBAHASAN

Penerapan konsep dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari merupakan suatu langkah bijaksana dan patut digalakkan. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik sangat dianjurkan lembaga-lembaga donor internasional untuk percepatan pembangunan di Negara berkembang bahkan dijadikan persyaratan pemberian bantuan ke berbagai negara berkembang. Dalam implementasi good governance Yap Kioe Sheng dari United Nations of Economic and Social Commission for Asia Fasific (tanpa tahun) mengemukakan karakteristik good governance yaitu; *participation; rule of law; tranparancy; responsiveness; consensus orientation; equity and inclusiveness; effectiveness and efficiency; accountability.*

Di Nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilia, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari yang sesuai dengan prinsip Good Governance. Secara rinci analisis berdasarkan indikator *Good Governance* adalah sebagai berikut:

Tabel Analisis Indikator Good Governance

No	Indikator	Analisis
1.	<i>Transparency</i>	Pembenahan proses tata kelola administrasi pemerintahan dan melibatkan seluruh <i>stakeholders</i> dalam nagari adalah untuk menjamin tercapai transparansi. Di dua nagari dimana kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan adanya respons positif dari peserta untuk memperbaiki tata kelola tersebut.
2.	<i>Responsiveness</i>	<i>Responsiveness</i> adalah bagaimana tata kelola administrasi pemerintahan nagari responsif terhadap tuntutan <i>stakeholders</i> . Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini terlihat adanya

		antusiasme perangkat nagari dan seluruh pemangku kepentingan yang lain untuk merespons tuntutan masyarakat untuk meningkatkan perbaikan tata kelola dan pelayanan.
3.	<i>consensus orientation</i>	Tata kelola pemerintahan yang baik adalah bagaimana terjadinya konsensus bersama seluruh <i>stakeholders</i> . Hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ini terlihat adanya konsensus bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan tata kelola demi administrasi pemerintahan nagari yang lebih baik
4.	<i>equity and inclusiveness</i>	administrasi pemerintahan harus menjamin adanya keadilan dan inklusivisme.

		Pada kegiatan pengabdian ini terlihat adanya diskusi terkait <i>sharing</i> sumberdaya-sumberdaya dalam nagari untuk digunakan secara bersama dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan
5.	<i>effectiveness and efficiency</i>	Tata kelola yang baik adalah yang menjamin tercapainya efektifitas dan efisiensi. Di dua nagari tempat pengabdian masyarakat berlangsung, para pemangku kepentingan memahami pentingnya efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola administrasi pemerintahan nagari.
6.	<i>accountability</i>	Dan indikator akuntabilitas adalah salah satu hal yang paling penting dimana tata kelola yang baik akan menjamin pertanggungjawaban yang baik

		pula. Berdasarkan hasil evaluasi, adanya peningkatan pemahaman terhadap pentingnya akuntabilitas terhadap administrasi pemerintahan nagari.
--	--	---

Prinsip-prinsip good governance tersebut sesuai dengan pedoman tata kelola pemerintahan desa sebagai dimaksud pada pasal 26 ayat (4 huruf f, h, i), Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Menurut isi pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tersebut bahwa kepala desa wajib melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan beberapa prinsip yaitu; akuntabel, transparan, profesionalitas, bersih, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; mengelola administrasi pemerintahan desa yang baik; dan mengelola keuangan dan asset desa secara baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola - 5 - administrasi pemerintahan desa termasuk pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat merupakan suatu keharusan sesuai dengan tuntutan undang-undang.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan

pembahasan di atas terdapat beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pemangku kepentingan di Nagari Kamang Mudiak dan Nagari Kamang Hilia memahami dan merespons positif terhadap kegiatan peningkatan kapasitas dalam tata kelola administrasi pemerintahan nagari setempat.
2. Adanya peningkatan kapasitas *stakeholders* pemerintahan nagari kamang mudiak dan Kamang Hilia dalam menerapkan konsep *Good Governance* dalam administrasi pemerintah nagari. Ini dibuktikan dengan kesesuaian materi dan narasumber disediakan dengan kebutuhan nagari tersebut.
3. Adanya tindak lanjut dengan permintaan proses pendampingan dengan ahli-ahli tata kelola pemerintahan lokal dari dua nagari tersebut untuk lebih mengoptimalkan penerapan konsep *good governance* pada pemerintahan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M.Fachri & Al Rafni (2015), *Konseptualisasi Model Tata Kelola Pemerintahan Nagari sesuai Prinsip Good Governance*, Laporan penelitian, Universitas Negeri Padang.

_____ (2014), *Konseptualisasi Model Tata Kelola*

Pemerintahan Nagari sesuai Prinsip Good Governance, Laporan penelitian, Universitas Negeri Padang.

Dwiyanto, Agus, 1997, *Pemerintah yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika*, dalam JKAP, Vol.1 No.2, Yogyakarta.

Farazman, Ali, Ed, (2004), *Sound Governance, Policy and Administrative Innovation*, Praeger Publishers, Westport, USA

Dt. Maani, Karjuni. 2010. “Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Nagari Perlu Ditinjau Kembali”. *SKM Serambi Pos*, 11 Oktober 2010.

Dt. Maani, Karjuni 2004. “Peningkatan Kemampuan Substansial dan Prosedural Aparatur Pemerintahan Nagari”. Artikel Ilmiah dalam *Jurnal Suluah Bendang*. Vol. IV No. 2 Oktober 2004, Padang: LPM UNP.

Efendi, Sofian (2012), *Perkembangan dan Hambatan Reformasi Administrasi di Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional XXIV AIPI, Bandung, 23-25 Mei 2012.



- International Fund for Agricultural Development, (1999), *Good Governance, An Overview*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), *Konsep Pedoman Good Public Governance*, Dikeluarkan oleh KNKG
- LAN dan BPKP.2000. *"Akuntabilitas dan Good Governance"*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta.
- Pusham UNP. (2009). *Kondisi Penyelenggara Pemerintahan Nagari di Kab. Pesisir Selatan*. Laporan Hasil Pengkajian dan Kerjasama dengan Komnas HAM Propinsi Sumatera Barat: Padang.
- Rafni, Al (1998), *Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan Lokal Pasca UU No. 5/1979 di Desa-desa Sumatera Barat dan Implikasinya terhadap Pembangunan Desa*, Tesis Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- _____,dkk (2005), *Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Nagari di Sumatera Barat*, Laporan Penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- _____(2009), *Evaluasi Nagari Bantuan Pilot Proyek dalam rangka Meningkatkan Pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*, Laporan Penelitian, BAPPEDA, Provinsi Sumatera Barat.
- _____(2011), *Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagai Basis Penataan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
- Syaiful, dkk. 2007. "Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat". *Laporan Penelitian*. Balitbangda Propinsi Sumatera Barat.
- Sheng, Yap Kioe (tanpa tahun) *What is Good Governance?*, United Nations-Economic



and Social Commission for
Asia Pacific.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43
tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang
nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Perda Provinsi Sumatera Barat No.
2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan
Nagari

Perda Kabupaten Agam No. 12
tahun 2007 tentang
Pemerintahan Nagari